

STRATEGI MENGEMBANGKAN DESA WISATA

Firman Syah

Dosen Tetap Hospitaliti dan Pariwisata - Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta

(2015 – sekarang)

Email: firman_tegal@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan desa wisata saat ini memiliki daya pikat yang baik. Bukan saja karena Indonesia terdiri dari beragam tradisi dan kebudayaan, namun kekayaan alam yang terbentang antara desa satu dengan desa yang lain memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Sehingga ketika wisatawan mencoba untuk mengetahui lebih dalam salah satu desa wisata di Indonesia, sudah barang tentu akan mengunjungi.

Peneliti menggunakan metode studi pustaka dengan analisis eksplanasi terhadap kebijakan pemerintah tentang pariwisata, terutama desa wisata. Sebagai desa wisata memiliki potensi alam antara lain pegunungan, agro, pantai, budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Peluang desa wisata ini harus mengedepankan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan lain yang sebagai identitas kemudian menjadi satu konsentrasi destinasi wisata tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan.

Untuk itu setiap desa dapat memaksimalkan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Namun, memutuskan konsep desa wisata dapat dimulai dari tingkat RT hingga kepala desa dengan tetap menerima masukan dan pandangan camat serta walikota/bupati setempat. Dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju.

Kata Kunci: Desa Wisata, Strategi Pengembangan, dan Peluang.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa wisata saat ini memiliki daya pikat yang baik. Bukan saja karena Indonesia terdiri dari beragam tradisi dan kebudayaan, namun kekayaan alam yang terbentang antara desa satu dengan desa yang lain memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Sehingga ketika wisatawan mencoba untuk mengetahui lebih dalam salah satu desa wisata di Indonesia, sudah barang tentu akan mengunjungi. Oleh karena itu, prinsip utama yang diterapkan oleh desa adalah bagaimana nilai-nilai luhur baik tradisi maupun kebudayaan yang melekat dan sudah menjadi karakter harus tetap terlindungi. Istilah saat ini, konsep yang dapat dikembangkan tersebut adalah konservasi lingkungan supaya habitat di dalamnya tidak punah (prinsip ekowisata).

The International Ecotourism Society atau TIES (2002) memaparkan bahwa ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi kehidupan penduduk lokal. Pola seperti ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada beberapa negara yang telah menerapkan strategi tersebut dengan tujuan utama menjaga lingkungan melalui aktivitas konservasi. Model seperti ini sudah dilaksanakan oleh beberapa negara. Sebut saja Taman Nasional Northeast Greenland dengan luas 927.000 kilometer persegi. Taman nasional ini merupakan terbesar di dunia dan dihuni oleh beruang kutub, walrus, rubah arktik, burung hantu salju dan lembu kesturi, antara spesies lainnya. Karena letak taman nasional yang diresmikan pada 1974 tersebut paling utara di dunia, sehingga wilayah itu sangat dingin dengan ditutupi padang salju selain juga sulit untuk dijangkau. Taman nasional yang masuk Kerajaan Denmark merupakan satu-satunya taman nasional di Greenland dengan garis lintang antara 59° dan 83° N dan bujur 11° dan 74° W.

Juga Kawasan Konservasi Laut Chagos di wilayah Samudera Hindia Inggris. Kawasan dengan luas 545.000 KM persegi ini merupakan area cagar laut terbesar di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut dianggap sebagai salah satu ekosistem laut terkaya di dunia. Termasuk area dimana penangkapan ikan komersial dilarang. Dengan begitu, ada sebuah langkah yang maju dalam rangka melindungi lautan di seluruh dunia yakni melindungi satwa laut untuk anak cucu dan menciptakan tempat yang aman untuk pembibitan stok ikan untuk kepentingan orang. Bahkan daerah tersebut juga melarang aktivitas seperti memancing industri dan pertambangan laut dalam dengan tujuan melestarikan sumber daya dunia kelautan untuk kepentingan generasi mendatang.

Selanjutnya Kepulauan Kawasan Lindung Phoenix yang terletak di Republik Kiribati dengan luas 408.250 kilometer. Kawasan tersebut adalah kawasan lindung cagar laut terbesar di Samudera Pasifik dan pertama di dalam air. Batu karang di Pulau Phoenix tampak seperti karang yang sudah berumur seribu tahun. Selain keindahan alam dan keunikan koleksi karang, kawasan lindung ini juga memiliki banyak sarang burung laut dan berbagai tumbuhan

langka. Banyak di antara tumbuhan itu yang digunakan sebagai obat tradisional oleh penduduk setempat. Sehingga pada 2010 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan kawasan ini sebagai Situs Warisan Dunia (Flobamora.ne). Seperti diketahui, Kepulauan Phoenix merupakan rute migrasi yang sangat penting bagi kehidupan laut dan burung. Tiga ekspedisi penelitian NEAQ sejak 2000 telah menemukan 120 spesies karang dan 520 spesies ikan baru untuk ilmu pengetahuan.

Di Negara Bagian Hawaii pun terdapat Monumen Laut Nasional Papahānaumokuākea yang memiliki luas 360.000 KM persegi. Monumen ini terdiri dari sepuluh pulau dan atol di Kepulauan Hawaii Northwestern dan sebagai rumah bagi 7.000 spesies yang berbeda. Monumen yang terletak 140.000 mil persegi dari pantai ini diakui secara internasional sebagai warisan budaya dan alam yang bernilai (Monumen Laut Nasional Papahānaumokuākea di Situs Warisan Dunia UNESCO). Kawasan tersebut dinyatakan oleh presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush pada 15 Juni 2006. Kemudian pada 2007 berganti nama Papahānaumokuākea dan resmi masuk UNESCO pada 30 Juli 2010. Alasan UNESCO adalah secara kosmologi dan tradisional bagi budaya pribumi Hawaii sebagai daerah leluhur, sebagai perwujudan konsep kekerabatan manusia dengan alam, dan sebagai tempat yang diyakini merupakan asal usul kehidupan serta tujuan roh orang yang sudah meninggal. Sebagian besar kawasan juga terdiri dari habitat laut lepas dan laut dalam serta memiliki tempat-tempat khas seperti gunung laut dan bukit bawah air, terumbu karang yang luas dan banyak laguna.

Ekowisata juga terdapat di Australia yakni Great Barrier Reef Marine Park yang berisi karang cluster terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi beberapa jenis biota laut yang eksotis. Bahkan, meskipun manusia diperbolehkan untuk mengunjungi daerah dengan luas 345.400 KM persegi tersebut, izin yang diperlukan sangat ketat. Sebagaimana namanya Karang Penghalang Besar (dalam bahasa Indonesia), wilayah ini terdiri dari lebih kurang 3.000 karang dan 900 pulau yang membentang sepanjang 2.600 KM, tepatnya di Laut Koral, lepas pantai Queensland di timur laut Australia. Kawasan ini pun dipilih sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1981. Bahkan kekayaan bio diversitas, perairan hangat dan jernih, serta keterjangkauan dari fasilitas terapung membuat kawasan tersebut menjadi tujuan wisata yang sangat populer terutama bagi para penyelam scuba.

Banyak kota di sepanjang pesisir pantai Queensland yang menawarkan wisata laut ke karang pada setiap hari, juga beberapa pulau kontinental yang telah berubah fungsi menjadi resor. Terdapat 30 spesies Paus Minke, Lumba-Lumba Bungkuk, dan Paus Bungkuk. Juga hidup Dugong dan lebih dari 1.500 spesies ikan berada di terumbu karang termasuk Ikan Giru, Red Bass, Red-Throat Emperor, dan beberapa spesies Ikan Snapper dan Ikan Kerapu Sunuk. Termasuk 6 spesies kura-kura laut yaitu Penyu Hijau, Leatherback Sea Turtle, Penyu Sisik, Loggerhead Sea Turtle, Flatback Sea Turtle, dan Olive Ridley Sea Turtle. Pun terdapat 4.000 jenis moluska, 200 jenis burung, dan 20 jenis reptil.

Sementara di Ekuador terdapat Galapagos Marine Reserve dengan luas wilayah 133.000 KM persegi. Letak di 1.000 KM lepas pantai Ekuador ini adalah cagar laut terbesar di negara berkembang dan cadangan terbesar kedua di dunia. Daerah ini adalah rumah bagi banyak spesies biota laut, termasuk hiu, paus, penyu, ikan dan sinar. Terdapat campuran arus laut panas dan hangat dan air tawar dan air laut, sehingga kawasan ini memiliki beberapa spesies unik di daerah tersebut antara lain reptil Iguana laut. Kepulauan Galapagos terdiri dari 13 pulau utama, pulau-pulau kecil yang 6 dan 107 batu terletak di Barat Ekuador. Di sini akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi pantai besar, tujuan ideal berselancar, cagar biosfer, cagar alam dengan ekosistem, fauna sangat kaya dan beragam. Hingga akhirnya pada 1978 kawasan Galapagos dilindungi sebagai warisan alam dunia yang harus disimpan dan dipelihara.

Terdapat juga Great Limpopo Transfrontier Park di Mozambique Afrika Utara dan Zimbabwe dengan luas 99.800 KM persegi. Di kawasan tersebut terdapat binatang-binatang Afrika yang dilindungi seperti gajah, jerapah, African Leopards, Cheetah, dan Hyenas. Juga Air and Tenere Natural Reserve seluas 77.360 KM persegi yang saat ini di bawah badan UNESCO World Heritage dengan 2 area perlindungan yaitu cagar alam dan tempat suci. Bisa juga Namib – Naukluft sebagai taman nasional di sebuah Gurun Namibia yang merupakan gurun tertua di dunia dengan luas 49.768 KM persegi. Di taman nasional tersebut terdapat Zera Gunung, Macan Tutul, Ular, Kadal, Serangga, Hyena, Gembok, dan Serigala selain juga bukit pasir setinggi 300 meter. Saat terjadi hujan yang sangat deras terbentuk semacam danau di bukit-bukit pasir yang hanya terjadi sekitar 10 tahun sekali.

Artinya, dibutuhkan peran penduduk lokal dalam pembangunan berkelanjutan tersebut. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan cepat, namun memiliki kualitas yang rendah memperlambat tercapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan semakin terbatas. Untuk itu, terdapat pula ekowisata berbasis budaya. Misalnya Jepang seperti dijelaskan Craig (2003: 4), budaya populer Jepang dapat dikatakan unsur-unsur budaya yang mengacu pada modern Jepang. Beberapa elemen dari budaya populer Jepang terkenal di seluruh dunia mencakup Anime, Cosplay, gaya busana Harajuku-Kei, Manga,

fashion Jepang, dan sebagainya. Bahkan seluruh dunia baik anak-anak, remaja, maupun dewasa telah terpesona dengan budaya populer Jepang. Bahkan animasi dan komik hasil karya Jepang telah membangun hubungan global yang sangat besar. Artinya, Jepang memberikan kontribusi bukan hanya untuk kehidupan materi saja tetapi untuk kehidupan kebudayaan.

Model-model kekayaan alam maupun kebudayaan sebagai tradisi negara-negara yang terus dilestarikan sebenarnya mampu menyedot perhatian besar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, tak jarang para wisatawan ikut terlibat di dalamnya sebagai pihak yang meramaikan acara. Oleh karena itu kekayaan masyarakat lokal baik dalam bentuk alam maupun budaya menjadi nilai tambah ketika disandingkan dengan wisata. Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk melaksanakan konsep pembangunan wisata sekaligus melestarikan alam. Intinya keberadaan desa wisata di Indonesia, harus menjadi pioner utama yang mendukung kepariwisataan. Langkah ini tentu perlu dilakukan dengan kerjasama yang baik semua *stakeholder* melalui penggalan potensi lingkungan. Artinya, masih butuh strategi dalam mengembangkan desa wisata yang ada di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul dan perlu didalami oleh penulis kemudian adalah:

1. Bagaimana strategi mengembangkan desa wisata di Indonesia?
2. Bagaimana peluang yang dapat dikembangkan desa wisata di Indonesia?

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan lebih maju, baik, dan berguna bagi semua kalangan. Suwanto (2009: 74) berpendapat beberapa bentuk produk pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agro tourism*), pariwisata pedesaan (*village tourism*), gastronomy (*culinary tourism*), dan pariwisata spiritual (*spiritual tourism*). Sementara dalam Permendagri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah pada Pasal 2 menjelaskan jenis ekowisata di daerah adalah ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan/atau ekowisata karst. Adapun pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata (Permendagri No. 33 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 6).

Pola seperti ini dapat juga dikembangkan oleh beberapa desa di Indonesia yang memiliki daya tarik untuk memaksimalkan peran pemberdayaan masyarakat. Widjaja (2011) menjelaskan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Ini berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Maka, masyarakat di desa sudah seharusnya dilibatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Karena ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan desa, terlebih yang akan menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Aturan hukum yang berlaku di desa ketika mengembangkan kepariwisataan adalah tanpa mengesampingkan tradisi dan adat masyarakat lokal. Sebab, melalui kebudayaan yang dilestarikan, masyarakat mampu membangkitkan rasa cinta lingkungan sehingga tetap terjaga keaslian. Belum tentu di desa lain menemukan keunikan sebagaimana dimiliki desa tersebut. Artinya, hukum dapat diambil secara tegas dalam rangka melahirkan sebuah kebijakan yang melindungi kebudayaan bangsa. Inilah dasar dari ekowisata, termasuk juga untuk melestarikan kekayaan alam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Konsep wisata tersebut bisa pula diaplikasikan untuk desa dan menjadi desa wisata. Dapat disimpulkan jika pengembangan desa wisata dalam bentuk produk adalah pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agro tourism*), gastronomy (*culinary tourism*), dan pariwisata spiritual (*spiritual tourism*). Daya tarik objek wisata di pedesaan sengaja dibuat dan dikembangkan oleh *stakeholder* supaya para wisatawan berbondong-bondong datang.

Seperti halnya destinasi wisata, konsep ekowisata juga memiliki beragam model. Antara lain pedesaan, agro, pegunungan, pantai, kuliner, dan lain-lain. Wisata pedesaan ini juga populer dengan istilah desa wisata, namun kekayaan potensi yang dimiliki hasil integrasi alam dengan tradisi yang menyatu. Sehingga melalui konsep desa wisata ini wisatawan akan tinggal dan membaur di dalam atau dekat dengan suasana tradisional. Sementara wisata agro memperkuat jatidiri desa yaitu dengan mengangkat hasil-hasil pertanian untuk dinikmati oleh wisatawan. Begitu pula dengan pegunungan dan pantai karena sudah menjual keindahan alam. Terkait kuliner, diakui Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dengan segala manfaat dapat dimaksimalkan untuk masyarakat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengembangkan desa wisata, pemerintah bersama masyarakat sudah semestinya mengembangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu, prinsip perbedaan yang ada di desa namun tetap mencerminkan jati diri bangsa. Beragam kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan lain yang menjadi identitas suatu pulau merupakan sebagian kecil kekayaan yang dimiliki Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi satu konsentrasi dan landasan untuk mengembangkan desa menjadi destinasi wisata tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi 'bumi, air, kekayaan alam di dalamnya, dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.' Landasan tersebut menjadi acuan yang baik untuk membangun dan mengembangkan kelurahan/desa demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat bersama. Sehingga arti kata penguasaan pada UUD RI 1945 dapat berarti pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam memutuskan konsep kelurahan/desa wisata. Mulai di tingkat RT hingga lurah/kepala desa. Namun tetap dengan menerima masukan dan pandangan kepada camat serta walikota/bupati setempat. Supaya kebijakan positif tersebut di kemudian hari tidak lagi melahirkan salah pemahaman baik di tingkat masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah. Akibatnya, konsep pengembangan kelurahan/desa wisata yang sudah bersama-sama dibuat tidak dapat menjalankan fungsi dengan sempurna (Syah, 2014).

Berbicara mengenai peluang desa, seluruh elemen yang ada di desa merupakan potensi yang memiliki daya tarik wisatawan. Lebih dari itu, desa mampu menyuguhkan tradisi, budaya, lingkungan, dan aktivitas yang belum tentu dimiliki desa lain. Artinya, sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat setidaknya memberi harapan bahwa aspek kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan tidak lepas dari pola kehidupan mereka. Bagaimanapun tidak hanya manusia, namun hewan dan tumbuhan juga membutuhkan tempat tinggal yang layak. Menjaga alam dan merawat dengan baik juga menjaga kelangsungan hidup seluruh ekosistem. Maka, harus ada kesepakatan awal di antara masyarakat desa dalam rangka mengembangkan potensi alam. Jika hal ini sudah berjalan dengan mudah pemerintah dan masyarakat akan mengembangkan desa wisata.

Beberapa kekayaan yang dimiliki antara lain:

1. Wisata petualangan biasanya di pegunungan. Karena yang ideal terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi, lingkungan asri dan masih menyimpan struktur alamiah yang belum tersentuh tangan manusia.
2. Wisata agro dengan salah satu potensi untuk pendidikan, seperti cara menanam hingga memetik hasil panen, terlebih jika terdapat goa-goa di sekitarnya. Contoh Kaligua di Bumiayu, Jawa Tengah.
3. Wisata bahari dengan nuansa pesisir pantai juga menyediakan aneka petualangan air seperti *sky boat* dan *driving*. Jika menjaga keanekaragaman hayati yang hidup di laut seperti mangrove juga dapat mendatangkan keuntungan ganda. Hal ini yang dilakukan masyarakat Kaliwlingi di Brebes, Jawa Tengah.
4. Wisata kuliner juga memperkenalkan masakan khas daerah di tempat tinggal mereka. Antara lain Soto Lamongan dan Soto Betawi, atau Sate Solo dengan Sate Madura yang memiliki resep berbeda.
5. Wisata budaya dan sejarah secara umum tak berbeda jauh. Tinggal sisi pengemasan seperti dibuatkan monumen, museum, atau pertunjukan lain untuk melestarikan dan memperkenalkan ke wisatawan.
6. Wisata kreatif identik dengan sebuah kerajinan tangan masyarakat lokal. Walau sama-sama membuat, namun antara batik Jogjakarta, Pekalongan, maupun Cirebon jelas memiliki ciri khas sendiri.

Artinya, model-model destinasi wisata yang berbasis pada ekowisata pada dasarnya sangat luas dan memiliki nilai-nilai leluhur yang sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang datang dari luar desa. Karena konsep desa wisata yang ketika dikelola dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan proporsional jelas memberikan nilai positif. Maka segala kebutuhan yang diperlukan desa dalam mengembangkan wilayah harus sesuai dengan kebutuhan desa tersebut.

Strategi pengembangan desa melalui pembinaan masyarakat juga dapat dilaksanakan supaya satu orang dengan yang lain memiliki pemikiran yang sama. Walau pada proses awal melalui tahap *brainstorming* yang memungkinkan masing-masing orang memiliki wacana. Ketika seluruh elemen masyarakat sudah sepaham maka mulai membuat rantai pasokan kebutuhan untuk desa. Hal ini bisa dikelola swadaya atau melalui koperasi. Misalnya, penjual kuliner membutuhkan beras, maka harus ada petani padi. Petani padi membutuhkan lahan, maka harus ada tanah desa yang siap menanam padi juga koperasi yang menjual bibit padi. Begitu pula dengan aspek lain seperti cenderamata, atraksi wisata, dan sebagainya (Syah, 2014). Secara ekonomi uang yang masuk dari wisatawan kemudian dikelola masyarakat dan tidak keluar, maka semakin menumpuk di dalam dan membuahkan hasil yang maksimal.

Hal ini sesuai 11 asas yang diamanatkan UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Yaitu, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis,

kesetaraan, dan kesatuan. Bagaimanapun terobosan-terobosan di masa depan tetap terus digali oleh desa wisata. Jangan sampai, wisatawan jenuh dengan model-model pariwisata yang ada di desa. Butuh inovasi yang tinggi untuk mengelola pembangunan dan pengembangan desa wisata sesuai kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Apalagi saat ini, desa-desa mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Berbagai program pembangunan desa sudah digalakkan, salah satunya melalui Alokasi Dana Desa. Awal kemunculan wacana tersebut adalah supaya membantu mempercepat dan memuluskan pembangunan di desa-desa. Butuh pengetahuan mendalam guna mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Karena, pada dasarnya pembangunan desa bukan sekedar pembangunan fisik.

Lebih dari itu, diharapkan ekonomi desa juga ikut maju yang akan membawa kesejahteraan bersama. Tentu saja program-program pemberdayaan dari sisi SDM, mengoptimalkan perekonomian melalui peluang yang ada, serta sistem informasi dapat disiapkan dengan matang dalam mendukung pembangunan desa. Artinya, aparatur desa juga harus diperhatikan supaya dalam mengelola anggaran desa dapat sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Jangan sampai terjadi ketimpangan pengelolaan atau ketidaktahuan desa akan dikemanakan anggaran yang datang dari pemerintah pusat. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Desa PDTT yang kala itu dijabat Marwan Jafar bahwa dana desa yang telah diterima dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur macam jalan desa, irigasi, jalan usaha tani dan sanitasi. Selain juga muncul berbagai kegiatan usaha ekonomi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek-proyek desa seperti usaha material, kuliner, pakaian, dan jasa transportasi (Syah, 2015).

Modal awal yang diterima oleh desa pada dasarnya mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena akan memanfaatkan potensi untuk dikenal secara luas oleh wisatawan. Semakin besar PAD yang didapat, akan semakin menguatkan jatidiri sebagai daerah yang mandiri. Bahkan, akan memungkinkan pembangunan dan pengembangan di desa tersebut semakin tahun akan semakin gencar dilaksanakan. Di samping itu, 'pintu' lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar dan ikut membantu daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Jika Pemda mengakui desa kurang dapat dikelola dengan baik, maka dapat melaksanakan kegiatan wisata dengan menjalin kerjasama pihak swasta. Dengan catatan terdapat Master of Understanding (MoU) di antara keduanya yang berisi hak dan kewajiban secara detail (Syah, 2014). Ketika seluruh aspek dasar lingkungan tersebut dipadukan setidaknya mengantar masyarakat di lingkungan tersebut untuk semakin cinta dan tertanam dalam diri akan tanggung jawab yang besar untuk mengelola lingkungan.

Termasuk penginapan supaya memudahkan wisatawan untuk tinggal sejenak di desa wisata. Penginapan tersebut berasal dari *homestay* yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan tetap mengedepankan nuansa alam. Contohnya rumah pohon Leo di Bogor dengan konsep yang lebih berbaur dengan alam sehingga selain berekreasi, wisatawan juga dapat pelajaran berharga dari alam. Oleh karena itu, dibutuhkan keahlian/keterampilan individu dari masyarakat dapat diasah dengan baik ketika secara konsep dasar mereka memiliki potensi. Bisnis yang dikembangkan menjadi salah satu cara pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kreatif penduduk sekitar. Supaya dalam waktu tertentu masyarakat tidak pasang surut dalam mengembangkan usaha maka pemerintah desa dapat membentuk lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan pengelola desa wisata secara khusus agar grafis target kunjungan wisatawan tetap merangkak naik.

Dalam Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata pada 2012 dijelaskan detail mengenai mekanisme Pokdarwis tersebut. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh *stakeholder* yang ada dan terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena masing-masing *stakeholder* tidak dapat berdiri sendiri, maka harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.

Sementara kalangan swasta (baik itu pelaku usaha/industri pariwisata) melalui sumber daya, modal dan jejaring yang dimiliki sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Adapun masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki berupa adat, tradisi, dan budaya berperan sebagai tuan rumah sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan dan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan harus diciptakan mulai dari lingkungan dan suasana yang kondusif. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut juga tidak lepas dari perwujudan konsep Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Model pergerakan Pokdarwis ini bahkan sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.

Konsep dari sadar wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif. Dimana masyarakat menyadari peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. Di samping itu, masyarakat menyadari hak dan kebutuhan untuk menjadi pelaku wisata sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air. Kedua elemen tersebut juga harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam sapta pesona, yaitu harus mewujudkan lingkungan yang kondusif dan ideal bagi perkembangan kegiatan kepariwisataan. Hal ini akan mendorong minat wisatawan. Sapta pesona tersebut meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Bagi masyarakat sendiri sadar wisata ini memiliki prospek yang baik, yaitu lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan yang meningkat.

Artinya, keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan desa wisata berperan sebagai salah satu unsur penggerak. Secara kolektif tindakan ini akan berdampak positif bagi perkembangan desa wisata yang lebih luas. Oleh karena itu, peran dan kontribusi dari Pokdarwis perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna menopang perkembangan dan pertumbuhan yang ada khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Secara umum, fungsi dari Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan dapat sebagai penggerak konsep sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan mereka. Juga sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah (Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, 2012).

Pada akhirnya, penyusunan dan pembentukan Pokdarwis tersebut menjadi acuan guna meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah akan terus berjalan. Pengembangan kepariwisataan yang ada di daerah juga secara pesat dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Kesejahteraan masyarakat di desa-desa tidak lagi diremehkan karena sudah mampu memaksimalkan potensi sekaligus mengedepankan konsep konservasi alam yang terkadang saat ini dianggap remeh. Padahal, sejatinya memperkenalkan segala potensi tersebut mampu menyedot daya tarik wisatawan yang ada di desa-desa.

4. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, diambil kesimpulan bahwa:

1. Strategi yang tepat dalam mengembangkan desa wisata di Indonesia adalah melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan lain yang menjadi identitas kemudian menjadi satu konsentrasi destinasi wisata tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan.
2. Peluang yang dapat dikembangkan desa wisata di Indonesia melalui beberapa kekayaan yang dimiliki. Antara lain wisata petualangan, wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah, dan wisata kreatif. Dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju. Namun, memutuskan konsep desa wisata dapat dimulai dari tingkat RT hingga kepala desa dengan tetap menerima masukan dan pandangan camat serta walikota/bupati setempat.

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku *stakeholder* harus memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk berkeaktifan dalam usaha membangun desa wisata.
2. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat di desa wisata perlu berkesinambungan dan terus menerus namun tetap melakukan tahap monitoring dan evaluasi sehingga tidak berjalan stagnan.
3. Masyarakat dituntut lebih proaktif dalam rangka mengapresiasi diri agar keluar dari kemiskinan dan pengangguran melalui kerja nyata di lingkungan sendiri.

5. Daftar Pustaka

Buku:

- Craig, J.C., dan Grant, R.M. (2003). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Mediator.
Suwanto, Gamal. (2009). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Widjaja, HAW. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen:

- Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Kementerian Pariwisata. (2012). http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1_20Pedoman%20Pokdarwis.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
The International Ecotourism Society (TIES), *Ecotourism Statistical Fact Sheet*, Quebec, Canada, 2002.
Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata.

Website:

- Billy, Yohanes Langgar. (2016). *Pulau-Pulau Phoenix, Kiribati*. <http://www.flobamora.net/berita/10107/pulaupulau-phoenix-kiribati.html> (akses 17 Juni 2017).
- Syah, Firman. (2014). *Membangun Konsep Kelurahan/Desa Wisata*. <https://news.detik.com/opini/d-2586516/membangun-konsep-kelurahandesawisata?ga=2.249140487.1473347882.1500425508-1271466504.1500092356> (akses 18 Juni 2017).
- Syah, Firman. (2014). *Destinasi Wisata Sebagai Aset Daerah*. https://news.detik.com/opini/d-2595172/destinasi-wisata-sebagai-aset-daerah?_ga=2.249140487.1473347882.1500425508-1271466504.1500092356 (akses 18 Juni 2017).
- Syah, Firman. (2015). *Mengoptimalkan Sumber Daya Desa (SDD)*. https://news.detik.com/opini/d-3045194/mengoptimalkan-sumber-daya-desa-sdd?_ga=2.249140487.1473347882.1500425508-1271466504.1500092356 (akses 18 Juni 2017).
- UNESCO. *Situs Warisan Dunia, Monumen Laut Nasional Papahānaumokuākea*. <https://www.en.unesco.org> (diakses 17 Juni 2017).